

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Anggaran APBD sebesar Belanja Tidak Langsung Rp. 19.074.400.000,- Belanja Langsung Rp. 33.710.115.122,- dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 18.737.046.000,- (Dekonsentrasi dan TP) yang terbagi dalam 5 (lima) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial RI.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai 4 (empat) sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

Untuk pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama yaitu :

Realisasi X 100% = untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan
Target kinerja semakin baik.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah :

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

No.	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	1 Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2 EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas dicapai dengan melaksanakan **6 program dan 62 kegiatan dengan capaian kinerja Fisik sebesar 100.00%** dan keuangan 97.85%.
2. Terwujudnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial dicapai dengan **1 program dan 1 kegiatan dengan capaian kinerja Fisik sebesar 100% dan keuangan 97.45%**.
3. Terwujudnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis dicapai dengan

melaksanakan 1 program dan 15 kegiatan, dengan capaian kinerja Fisik sebesar 93.29 % dan keuangan sebesar 89.80%.

4. Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial dicapai dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan capaian kinerja Fisik sebesar 100 %.dan keuangan sebesar 99.95%.

Lebih rinci ilustrasi pencapaian sasaran berdasarkan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017 Per Triwulan

NO	Sasaran Strategis	indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Per Semester	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5				
1.	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri : Panti Pemerintah Panti Swasta	Orang orsng	925 4400	Semester I Semester II Semester I Semester II	925 925 - 4400	225 925 - 4400	27.57 100.00 - 100.00
		Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	orang	30	Semester I Semester II	30 30	15 30	50.00 100.00

		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil	orang	25	Semester I Semester II	25 25	15 25	60.00 100.00
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri	kk	200	Semester I Semester II	- -	- -	- -
2.	Terwujudnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	panti	15	Semester I Semester II	15 15	10 15	66.67 100.00
3.	Terwujudnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dan profesional	orang	665	Semester I Semester II	- 665	- 665	- 100.00

	bimbingan teknis							
4.	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan social	Jumlah daerah yang terpenuhi nya kebutuhannya logistik	Kab/kotora	19	Semester I Semester II	19 19	7 19	36.84 100.00

Penetapan target dan pengukuran realisasi persemester dilakukan dengan menggunakan *proxy indicator* karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan *proxy indicator* adalah sebagai berikut:

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada *level outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Dinas Sosial, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun.

1. Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas

Pengukuran capaian sasaran strategik 1 dengan 4 indikator dapat diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
PENGUKURAN SASARAN TERWUJUDNYA PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BERKUALITAS
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2016	2017			
			Per Semester	Target	Realisasi	Capaian %
1	3	4	5			
1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri : - Panti Pemerintah - Panti Swasta	255	Semester I	925 4400	255 -	27.57 -
			Semester II	925 4400	925 4400	100.00 100.00
2	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	165	Semester I	30 orang	15	50.00
			Semester II	30 orang	30	100.00
3	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil	70	Semester I	25 orang		
			Semester II	25 orang	15	60.00
4	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri.	86	Semester I	200 KK	-	-
			Semester II	200 KK	-	-

Sumber: Renstra (2016-2021), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

Memperhatikan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas dapat diukur dengan melihat capaian 4 indikator sasaran yaitu Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri : Panti Pemerintah dan Panti Swasta, Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil, Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil, Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri.

a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri :

- **Panti Pemerintah**
- **Panti Swasta**

Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2017 yang berada pada Panti Sosial milik pemerintah pada 8 UPTD sebanyak 925 orang dan panti sosial swasta sebanyak 4400 orang diantaranya Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, Wanita Tuna Susila dengan indikator capaian dapat mandiri ditargetkan sebanyak **5325 orang pada tahun 2016, meningkat dari tahun 2015.**

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan beberapa Program kegiatan diantaranya :

Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan :

- *Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)*

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya pengadaan kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan memenuhi kebutuhan bahan praktek keterampilan anak terlantar pada PSABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 360 orang untuk 1 tahun.

- *Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar*

Pelatihan keterampilan bertujuan agar anak terlantar memiliki kemampuan dibidang keterampilan kerja tertentu sehingga dapat digunakan sebagai bekal / modal untuk melakukan kegiatan ekonomis produktif dan hidup mandiri setelah mereka keluar dari panti, diharapkan juga sebagai dasar dalam **menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.**

Dengan adanya pelatihan dan praktek keterampilan belajar bagi anak terlantar sangatlah membantu jika kita bandingkan dengan sewaktu belum masuk panti mungkin ilmu atau keterampilan yang didapat belum ada dari

pada setelah masuk panti yang mana ilmu dan keterampilan yang didapat bisa untuk mandiri nantinya dan mampu membuka pekerjaan ditengah-tengah masyarakat/keluarga khususnya, dalam pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan kegiatan mulai dari pengadaan honor instruktur, pengadaan bahan dan peralatan percontohan praktek anak terlantar.

- *Pengadaan Makanan dan Minuman (biaya makan klien)*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan anak terlantar yang dianggarkan dimana dalam menyusun menu sehari-hari sangat memperhatikan Sasaran dari SDGs yakni Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dimana Menu selalui di ketahui oleh Pihak Puskesmas. Sehingga makan dan minum tersebut menunjang dalam pelaksanaan aktivitas anak dalam menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh instruktur, Pada kegiatan ini pelaksanaannya adalah makanan dan minuman anak terlantar dalam panti selama 1 tahun, indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dan secara maksimal dapat mendukung pencapaian sasaran.

- *Penyediaan bahan obat-obatan dan Dokter Habis Pakai*

Dalam meningkat pelayanan kesejahteraan sosial dalam kegiatan penyediaan obat-obatan guna pertolongan pertama yang dilakukan sebelum ada rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) dengan adanya program pemerintah BPJS bagi anak panti yang telah ditanggung oleh Negara untuk itu dalam pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis, indikator sasaran ini telah mencapai 100%.

- *Bimbingan Teknis Pembinaan Balita Terlantar*

Pencapaian target indikator sasaran ini sebesar 100%, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam pendampingan anak terlantar dalam mengelola Bantuan Sosial Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta meningkatkan keterampilan pendamping dalam meningkatkan kerjasama anggota UEP dalam meningkatkan pendapatan.

- *Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak*

Pencapaian target indikator sasaran ini sebesar 100% target dari indikator kegiatan ini adalah tersampainya informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK) kepada pengurus panti sosial anak swasta se Sumatera Barat, serta untuk sharing pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di Pusat, Propinsi dan Kab/Kota

Selain dari itu, apabila dibandingkan dengan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sesuai target Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat bahwa kedua program tersebut seluruhnya dapat tercapai sesuai target indikator

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatan yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial se-Sumatera Barat yang dikirim Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

- Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas.

Kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran Penyandang disabilitas dalam suatu keluarga dan lingkungan sosial secara sosiologis terkadang menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidakberfungsian sosial keluarga dan lingkungan serta perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas sehingga memerlukan penanganan serta pelayanan yang terpadu, terarah, berkesinambungan serta profesionalisme.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan tetapi juga masyarakat baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu Yayasan Pendidikan Luar Biasa atau Yayasan Sosial pelayanan penyandang disabilitas, dan harus dilakukan secara sinergis di seluruh sektor.

Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 13 April 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka diperlukan aturan Teknis pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Gubernur sehingga maksimal SKPD Provinsi dalam menyiapkan fasilitas yang berhubungan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang serius, sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyiapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat mengatur akses hak-hak (memperoleh aksesibilitas), kesempatan, dan perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- c. Hak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- d. Hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Beberapa ahli menyatakan keenam hak-hak yang dikemukakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut, masih kurang ideal bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah/masyarakat terhadap kesejahteraan penyandang cacat, dinilai baru hanya sebatas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Belum sampai pada titik untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologi dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities/Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang mengubah paradigma dari sebelumnya disabilitas dilihat sebagai problem dan solusinya dengan charity

atau belas kasihan, kini penyandang disabilitas di pandang sebagai pemegang atau pemilik hak (holder of rights).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung pasal 31 mengatur secara khusus bahwa keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tujuan penyediaan fasilitas aksesibilitas untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik melalui Ombudsman sudah meninjau secara langsung ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan diperkirakan sekitar 50 % sudah memiliki akses untuk penyandang disabilitas, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, seperti Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat yang telah banyak memberikan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Sebagai Institusi yang bertanggungjawab kepada penyandang disabilitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya peningkatan pelayanan selama tahun 2017 yaitu :

- a. Melengkapai petugas Pelayanan difront terdepan dengan petugas costumer Service yang siap menyambut dan melayani tamu yang datang.

Photo petugas Costumer Service di Pelayanan Terdepan



b. Melengkapi Fasilitas Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas :

- Pegangan tangan (Ram tangan) yang berfungsi untuk membantu penyandang disabilitas agar mempermudah dalam memperoleh pelayanan.



- Ubin Pemandu bermotif berfungsi untuk memudahkan penyandang disabilitas agar dapat berjalan secara mandiri dan dapat merasakan motif pada ubin pemandu tersebut dan ubin pemandu juga dapat diberi warna.



- Toilet duduk yang di lengkapi dengan pegangan berfungsi agar penyandang disabilitas merasa aman saat menggunakan fasilitas tersebut.



c. Memasang jenis pelayanan :

- Papan Informasi tentang pendaftaran LKS dan Adopsi Anak Asuh berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik dalam rangka langkah-langkah pendafrtan lembaga kesejahteraan sosial.



- Papan Kode Etik pelayanan Publik yang dapat dibaca oleh publik
- Layanan Pengaduan Pelayanan yang di Informasikan kepada publik agar dapat melaporkan setiap pelayanan yang kurang baik
- Maklumat Dinas Sosial tentang pelayanan sosial yang sesuai dengan standard pelayanan.



- Kotak Penilaian Indeks Kepuasan berfungsi agar publik dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan dan tolak ukur bagi Dinas Sosial agar dapat meningkatkan pelayanan.



- Kotak Saran berfungsi untuk publik agar bebas berpendapat dan memberikan masukan dalam pelayanan.



- Papan Informasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada Publik.



Sesuai dengan target Sasaran pada tahun 2016 sebanyak 41 SKPD yang sudah menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas..

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Penanganan terhadap penyandang disabilitas melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2016 dengan Jumlah Penyandang disabilitas yang mandiri ditargetkan 180 orang melalui dana APBD. Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah sasaran sama dengan tahun 2017, hal ini disebabkan daya tampung dari UPTD tetap setiap tahun.

Dari kegiatan diatas ini capaian kinerjanya baik yaitu (99,95 %), dan pencapaian indikator kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan

Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari paparan sebagai berikut:

- *Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah 98,09%, dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu seleksi penyandang disabilitas netra di Kab/Kota, pelaksanaan penerimaan kelayan dengan memperhatikan bakat dan potensi yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 13 April 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam rangka membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang disabilitas netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang disabilitas netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari untuk dapat hidup secara mandiri. kegiatan ini dilaksanakan terhadap 50 orang penyandang disabilitas netra. Keterampilan yang diberikan adalah massage dan shiatsu serta bimbingan sosial dengan masa pembinaan selama 3 tahun, dengan jumlah yang diterminasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 38 orang. Setiap terminasi akan diganti dengan kelayan baru.

Jika dibandingkan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 jumlah sasaran sebanyak 50 orang yang diberikan pelatihan sama, hal ini disebabkan kapasitas / daya tampung tetap setiap tahunnya. Untuk meningkatkan jumlah sasaran maka akan terkait dengan anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

- *Biaya makanan dan minuman kelayan*

Makan dan minum kelayan adalah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas didalam panti, dimana dalam menyusun menu sehari-hari memperhatikan pola 4 sehat 5 sempurna melalui rekomendasi dari ahli gizi Puskesmas terdekat, hal ini dilakukan untuk penunjang kesehatan fisik dan mental yang seimbang anak didalam panti. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya anggaran untuk makan

dan minum kelayan tidak ada kenaikan, sementara harga kebutuhan bahan pokok selalu naik, tetapi keadaan ini tidak mengurangi standar gizi yang diberikan kepada kelayan.

Pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan anak disabilitas dalam panti yang dianggarkan. Indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dan secara maksimal dapat mendukung pencapaian sasaran.

- *Penyediaan bahan obat-obatan pakai habis*

Dalam rangka memberikan pertolongan pertama kepada kelayan didalam panti maka disediakan obat-obatan yang sifatnya obat ringan dan diberikan melalui tenaga medis (perawat), secara keseluruhan kelayan sudah masuk anggota BPJS Kesehatan sehingga kalau diperlukan rujukan ke Rumah Sakit sudah dijamin biaya pengobatan dengan BPJS. Jika dibanding Tahun 2016 dengan Tahun 2017 tidak banyak kelayan yang harus dirujuk ke Rumah Sakit hal ini disebabkan pengaturan standar gizi yang diberikan kepada kelayan.

Pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan, kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun di PSBGHI Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang terhadap 150 orang, adapun bentuk kegiatan ini adalah penyediaan obat-obatan ringan beserta seorang tenaga medis, indikator sasaran ini telah tercapai 100%.

- *Kegiatan Biaya kelengkapan kelayan*

Guna mengikuti kegiatan yang dilaksanakan didalam panti, untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan disediakan kelengkapan, mulai dari pakaian, sabun (mandi, cuci), sepatu, sandal dan lain-lain. Disamping itu juga disediakan kelengkapan untuk kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olah raga, kesenian dan pramuka), penyediaan kelengkapan tersebut diharapkan kelayan dapat hidup secara layak dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang berada di luar panti.

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan harian seperti: pengadaan kasur, bantal, baju harian, beju lebaran, sandal, jilbab, peci serta kebutuhan lainnya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan kelayan. Target indikator kegiatan ini tercapai 100%

- *Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang cacat melalui Loka Bina karya*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah 100%, dengan tujuan pelaksanaan adalah memberikan keterampilan untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri para Orang Dengan Kecacatan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka dalam menjalani hidup secara wajar ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan para Orang Dengan Kecacatan.

- *Bimbingan social pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat*

Target indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dengan beberapa pelaksanaan kegiatan seperti seleksi pada Kab/Kota untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan bimbingan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada pendamping agar pendamping mengetahui tentang pelaksanaan pemberian bantuan yang dialokasikan kepada penyandang disabilitas berat.

- *Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma*

Target indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dengan asumsi bahwa kelayan pada panti cacat mental yang berjumlah 100 orang tersebut dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan, memperoleh makanan dan minuman serta bahan kelengkapan dan kebutuhan harian. Hal yang harus digaris bawahi adalah perlunya pengertian bahwa anak cacat mental yang diterima di PSBGHI adalah mampu didik dan mampu latih . Dengan tujuan

kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan agar anak retardasi mental mampu didik dan mampu latihan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

Penanganan Lanjut usia di dalam panti sosial adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar sebanyak 180 orang, guna mengisi hari-hari tuanya dengan tenang dan lebih meningkatkan pengamalan agamanya, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo
- b. Kegiatan Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo
- c. Kegiatan Kelengkapan Klien di Panti Asuhan
- d. Biaya makanan dan minuman klien di Panti Jompo
- e. Kegiatan Penyediaan bahan Obat-obatan Pakai Habis
- f. Biaya Pendidikan Klien
- g. Biaya Jasa Penguburan / pemulangan klien
- h. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan
- i. Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Asuhan
- j. Penyediaan Bahan Obat-obatan Pakai Habis
- k. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti asuhan
- l. Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik dengan capaian kinerja fisiknya 100% dan keuangan 99,94 %. Secara keseluruhan pencapaian sasaran dikatakan berhasil sesuai target yang direncanakan. Realisasi capaian target indikator sasaran dan

capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

- *Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo*

Seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup maka bertambah juga lanjut usia yang terlantar. Untuk menanggulangi masalah lanjut usia ini banyak terbentuk lembaga/panti jompo baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun yayasan keagamaan.

Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya memberikan pelatihan menyulam, membuat keset kaki, membuat sapu lidi dsb. Hal ini dilakukan agar lanjut usia terlantar dalam panti dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri dengan motto “Tua Berguna Berkualitas”.

- *Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo*

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan harian seperti: pengadaan kasur, bantal, baju harian, beju lebaran, sandal, jilbab, peci serta kebutuhan lainnya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan kelayan lanjut usia. Target indikator kegiatan ini tercapai 100%

- *Kelengkapan Klien di Panti Asuhan*

Pencapaian target indikator kegiatan ini adalah sebesar 100%, merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan harian anak asuh dalam panti.

- *Biaya makanan dan minuman klien di Panti Jompo*

Dengan adanya permakanan dan minuman untuk kelayan dipanti jompo guna meningkatkan kebutuhan kelayan dalam pelayanan sehari-hari sehingga dalam penyusunan makanan dan minuman ini selalui diketahui oleh pihak Puskemas setempat yang mengetahui menu sehat terutama sekali 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna dalam menunjang kehidupan kelayan panti jompo kedepannya, sehingga pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan lanjut usia terlantar

yang dianggarkan, Pada kegiatan ini pelaksanaannya adalah makanan dan minuman dalam panti selama 1 tahun, indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dan secara maksimal dapat mendukung pencapaian sasaran.

- *Penyediaan bahan Obat-obatan Pakai Habis*

Dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial untuk menompang kesehatan kelayan panti jompo dilakukan pertolongan pertama dengan adanya obat-obatan ringan jika ada yang lebih memerlukan rujukan dengan BPJS yang diprogramkan oleh pemerintah untuk penghuni panti jompo sehingga dalam pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan, kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, adapun bentuk kegiatan ini adalah penyediaan obat-obatan ringan beserta seorang tenaga medis.

- *Biaya Jasa Penguburan / pemulangan klien*

Dipergunakan untuk biaya penguburan lanjut usia yang meninggal dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

- *Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah 100%, sasaran ini dicapai dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu seleksi pada masing-masing Kab/Kota, pengiriman nama dan penetapan SK oleh Kepala Dinas Sosial. Dengan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pendamping JSLU sehingga tercipta kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksana di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial lanjut usia secara tepat.

Selain dari itu, apabila dilihat dari trend kinerja dari tahun 2016 sampai tahun 2017 telah sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yatim, piatu atau yatim piatu miskin bertujuan untuk melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan (fisik , mental dan sosial) pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam pembangunan nasional.

Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo yang terdiri dari dua belas kegiatan masing-masing:

- a. Kegiatan Kelengkapan Klien di Panti Asuhan
- b. Kegiatan Penyediaan bahan Obat-obatan Pakai Habis
- c. Biaya Pendidikan Klien
- d. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan
- e. Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Asuhan
- f. Penyediaan Bahan Obat-obatan Pakai Habis
- g. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti asuhan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik dengan capaian kinerja fisiknya 100%. Secara keseluruhan pencapaian sasaran dikatakan berhasil sesuai target yang direncanakan. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

- *Kelengkapan Klien di Panti Asuhan*

Pencapaian target indikator kegiatan ini adalah sebesar 100%, merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan harian anak asuh dalam panti.

- *Biaya Pendidikan Klien*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah 100% dan sesuai dengan pemanfaatan, Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di PSAA Tri Murni Padang Panjang yang dipergunakan selama 1 tahun untuk biaya alat tulis, pembelian LKS, pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran uang pendaftaran murid baru, uang pembangunan dan biaya foto copy materi pelajaran sekolah.

- *Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan*

Kegiatan ini terlaksana 100%, beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah pemenuhan kebutuhan sekolah anak asuh, uang jajan, transport, biaya buku dan biaya les serta biaya seleksi untuk 1 tahun.

- *Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Asuhan*

Pada kegiatan ini pelaksanaannya adalah makanan dan minuman kelayan dalam panti selama 1 tahun, indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dan secara maksimal dapat mendukung pencapaian sasaran.

- *Penyediaan Bahan Obat-obatan Pakai Habis*

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun di PSAA Tri Murni Padang Panjang terhadap 100 orang anak, adapun bentuk kegiatan ini adalah penyediaan obat-obatan ringan beserta seorang tenaga medis, indikator sasaran ini telah tercapai 100%.

- *Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti asuhan*

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk terjaminnya kelangsungan hidup, tumbuh, kembang dan perlindungan anak, khususnya anak asuh yang berstatus piatu, yatim, yatim-piatu dan miskin sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial setara dengan anak lainnya.

Selain dari itu, apabila jika dibandingkan dari trend kinerja dari tahun 2016 sampai tahun 2017 telah sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Program Pembinaan Eks Panyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Narkoba dan Penyakit Sosia lainnya)

Penanganan terhadap Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wanita Tuna Susila melalui serangkaian pelaksanaan program/kegiatan bimbingan, rehabilitasi sosial pada tahun 2016 dengan sasaran sebanyak 40 orang.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui kegiatan sebagai berikut::

- a. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)
- b. Kegiatan Biaya obat-obatan
- c. Kegiatan Pengadaan makanan dan minuman
- d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Berusaha bagi eks Penyakit Sosial
- e. Kegiatan Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban Napza/HIV/AIDS
- f. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

Dari kegiatan diatas ini capaian kinerjanya sangat baik yaitu (100%), dan pencapaian indicator kinerja telah sesuai target.

Secara keseluruhan pencapaian sasaran dikatakan berhasil sesuai target yang direncanakan. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari paparan sebagai berikut:

- *Kegiatan Biaya kelengkapan klien*

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan harian seperti: pengadaan kasur, bantal, baju harian, baju lebaran, sandal, jilbab, serta kebutuhan lainnya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan kelayan diberikan pembinaan yang mana dari latar belakang setiap kelayan berbeda dan disesuaikan dengan

kebutuhan yang ada sehingga bisa menjadi kelayan yang mandiri . Target indikator kegiatan ini hanya tercapai 77, 87 %.

- *Penyediaan bahan obat-obatan pakai habis*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan, kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok terhadap 40 orang, adapun bentuk kegiatan ini adalah penyediaan obat-obatan ringan beserta tenaga medis pada pertolongan pertama dalam penanganan salah satu kebutuhan kelayan tentang kesehatan kelayan yang dibina, jika dibandingkan pada tahun 2016 kesehatan anak panti belum adanya BPJS Kesehatan namun pelayanan yang diterima kelayan hanya merupakan pertolongan yang masih ditangani oleh panti, dan pada tahun 2017 kesehatan untuk anak panti sudah ditanggung oleh negara berdasarkan BPJS Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelayanan kesehatan dari tahun ketahun yang didapatkan oleh kelayan panti, indikator sasaran ini telah tercapai 100%.

- *Biaya makanan dan minuman kelayan*

Pencapaian target indikator sasaran ini telah sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan pangan di dalam panti dimana dalam memberikan permakanan dan minuman kelayan ini sudah diatur berdasarkan kerjasama dengan pihak Puskesmas guna menjaga kesehatan gizi kelayan yang dibina dan telah diatur dalam *Daftar Menu Makanan dan Minuman Kelayan*, indikator sasaran ini telah tercapai 100%, dan secara maksimal dapat mendukung pencapaian sasaran.

- *Pendidikan dan Pelatihan bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok*

Guna memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang ada dalam upaya pencapaian target indikator sasaran ini telah 100%, kegiatan ini bertujuan memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita

Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar ditengah-tengah masyarakat dan keluarga sehingga dapat menunjukkan etika yang sesuai dengan norma-norma agama dan adat yang berlaku serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan, sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai kaidah agama dan etika .

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

- Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat

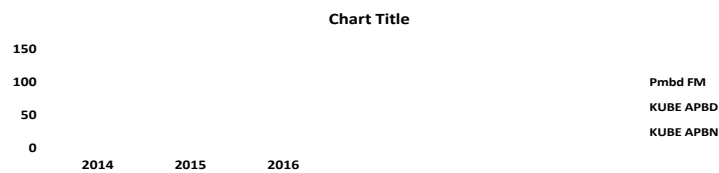
Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti. Serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras dan telah didistribusikan kepada **123 panti sosial di 19 Kab/Kota untuk 4.429** orang anak yang berada dalam panti swasta dan masing-masing anak mendapatkan 400 gr beras selama 118 hari. Adapun sistem pemberian bantuan dilaksanakan dengan 2 termyn, yaitu :

- a. **Termyn I berjumlah 106.296 kg**
- b. **Termyn II berjumlah 102.753 kg**

Indikator ini tercapai sebesar 99,71 % dimana dari target tahun 2016 sebanyak 4.400 orang sedangkan terealisasi sebanyak 4.429 orang. Pengadaan beras untuk panti swasta pada tahun 2015 kegiatan yang terevaluasi Kementerian Dalam Negeri.

- *Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*

Bantuan KUBE melalui APBD Dinas Sosial Provinsi mulai dianggarkan pada tahun 2014 sebanyak 50 Kelompok, yang merupakan bagian dari aspirasi dari anggota DPRD provinsi Sumatera Barat dimana pada tahun sebelumnya belum ada kegiatan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika dibandingkan bantuan KUBE melalui APBN masih sangat sedikit yang dianggarkan melalui APBD. **Sedangkan pada tahun 2015 kegiatan tersebut terevaluasi Kemendagri, pada tahun 2016 kegiatan tidak di anggarkan lagi.** Sedangkan melalui anggaran Dekonsentrasi Kementerian Sosial kegiatan ini masih ada. Pada grafik berikut dapat digambarkan jumlah KUBE yang mendapatkan bantuan :



Pada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk tersebut perlu didampingi oleh seorang pendamping yang berperan penting dalam proses pemberdayaan fakir miskin sehingga seorang pendamping seharusnya mempunyai kemampuan, keterampilan , sikap dan mental sekaligus sebagai agen perubahan dalam pendampingan di masyarakat.

- *Bimbingan Pemantapan Pendampingan KUBE FM*

Pencapaian target indikator kegiatan ini yang perlu ditanamkan terhadap pendamping KUBE adalah fungsi dari pendamping untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta peran pendamping KUBE-FM sehingga memiliki kualifikasi kemampuan, keahlian serta sikap mental yang mampu membina kelompok dan keluarga fakir miskin agar produktif dan mandiri. Jumlah pendamping pada tahun 2015 yang dilatih masih sama jumlahnya

dengan yang dilatih pada tahun 2016, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

b. Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil

Penanganan terhadap Komunitas Adat Terpencil pada tahun 2017 dengan capaian warga Komunitas Adat Terpencil yang terampil ditargetkan sebanyak 30 orang dan terealisasi 100 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 target tahun 2016 boleh dikatakan sama hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk mengatasi hal tersebut melalui dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial juga melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yakni menyediakan 76 unit rumah dan memberikan bantuan hidup untuk 162 KK.

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan beberapa Program kegiatan :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan, yang umumnya berada pada daerah yang sulit dijangkau. Daerah yang dijadikan fokus Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada Tahun 2017 sudah menganggarkan kegiatan dalam rangka penyiapan lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) untuk tahun 2018.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui program/kegiatan dengan pembiayaan APBD, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil
- b. Kegiatan Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2018.

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari paparan sebagai berikut:

- *Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil*

Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan diantaranya seleksi warga dengan memperhatikan kekhususan yang mereka miliki, menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan serta pelaksanaan keterampilan dengan jumlah sasaran sebanyak **30 KK pada tahun 2015 dan sasaran sebanyak 30 KK pada tahun 2016.**

Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan bahan lokal yang sekaligus menjadi mata pencaharian sehingga dapat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera pada masa-masa yang akan datang.

- *Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2018.*

Fokus perhatian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan berupa :

- Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukan sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil yang berada di Dusun Kulukubuk Desa Masat dan Kulukubuk Kec. Siberut Selatan (2)

Menghimpun data potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia (3) Menetapkan kategori Komunitas Adat Terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan lapangan.

Semiloka Daerah Hasil Study Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi Dusun Kulukubuk Kec. Siberut Selatan sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil di Sumatera Barat tahun 2017.

c. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil

Penanganan terhadap Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2016 dengan sasaran sebanyak 69 orang dari target sebanyak 25.

- *Pelatihan Keterampilan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan;*

Pelatihan Keterampilan Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan, tujuan dari kegiatan ini adalah dapat terpulihkan kembali harga diri, percaya diri, kemauan serta kemampuan para korban untuk melaksanakan fungsi sosial secara wajar serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat untuk menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup para penyandang masalah sosial.

- *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan*

Untuk mencapai target indikator sasaran dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu seleksi Korban Tindak Kekerasan sosial di Kab/Kota dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan. Hasil yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat Korban Tindak Kekerasan

agar dapat memberikan/menimbulkan semangat hidup serta membantu perekonomian para Korban Tindak Kekerasan.

- *Asistensi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Pekerja Migran.*

Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Pekerja Migran bermasalah yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan UEP. Sehingga mereka dapat terpulihkan kembali seperti harga diri, percaya diri, kemauan serta kemampuan para pekerja migran bermasalah untuk melaksanakan fungsi sosial secara wajar serta meningkatkan peran serta mereka dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

d. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui program dengan pembiayaan APBD, program dimaksud adalah:

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

- *Pelatihan/Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka Harganas)*

Pencapaian target indikator sasaran ini sebesar 100%, target indikator kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi berusaha keluarga tidak mampu/miskin dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawananan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera. Sementara metode kegiatan adalah Penyuluhan, Kampanye Sosial Keluarga dan Bhakti Sosial dengan pemberian paket sembako kepada 50 KK miskin.

- *Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Rentan dan Mengalami Masalah Sosial Ekonomi*

Pencapaian target indikator sasaran ini hanya sebesar 30 % (fisik) dan 29,93 % (keuangan) , hal ini disebabkan karena adanya penundaan DAU sehingga kegiatan tidak terealisasi sampai dengan bantuan yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga rentan sebanyak 200 KK.

2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial

TUJUAN 1	SASARAN 2
Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Terwujudnya kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengukuran capaian sasaran strategis 2 dengan 1 indikator dapat diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
PENGUKURAN SASARAN TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2015	2016			
			Per Semester	Target	Realisasi	Capaian %
1	3	4		5		
1.	Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	76	Semester I	15 Panti	10 panti	66,67
			Semester II	15 Panti	15 panti	100.00

Sumber: Renstra (2016-2021), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

Memperhatikan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Terwujudnya kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat diukur dengan melihat capaian 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi.

a. Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepastian pelayanan pada Panti Sosial Swasta maka salah satu syarat yang harus dimiliki untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah Surat Izin Operasional (SIOP). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Surat Izin Operasional (SIOP) merupakan bagian dari Akreditasi yang dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (swasta) . Sejalan dengan itu berdasarkan Permensos nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Dari Jumlah Panti Sosial swasta sebanyak 127, sampai dengan tahun 2015 sudah 76 panti sosial yang sudah memiliki Surat Izin Operasional (SIOP) dan 51 yang masih terdaftar.

Dari 76 panti sosial swasta tersebut pada tahun 2016 yang telah mempunyai SIOP tersebut telah terakreditasi sebanyak 13 panti sosial swasta.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui program dengan pembiayaan APBD, program dimaksud adalah :

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
- c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
- d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.

3. Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis

TUJUAN 2	SASARAN 3
Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.	Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis

Pengukuran capaian sasaran strategik 3 dengan 1 indikator dapat diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
PENGUKURAN SASARAN TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN POTENSI DAN
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) MELALUI PELATIHAN DAN
BIMBINGAN TEKNIS
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2015	2016			
			Per Semester	Target	Realisasi	Capaian %
1	3	4		5		
1.	Jumlah PSKS yang terampil dan profesional	86	Semester I	665 orang	-	-
			Semester II	665 orang	665	100.00

Sumber: Renstra (2016-2021), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

Memperhatikan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis dapat diukur dengan melihat capaian 1 indikator sasaran yaitu Jumlah PSKS yang terampil dan profesional.

b. Jumlah PSKS yang terampil dan profesional

Pembinaan Pekerja Sosial, PSM, Karang Taruna, TKSK pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 665 orang, terealisasi sebanyak 665 orang. Di bandingkan dengan penangan yang sama di tahun 2015 sebesar 86 orang, maka capaian tahun ini mengalami peningkatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Capaian Kinerja Kegiatan dalam program-program yang di tujukan bagi pencapaian sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik yakni semua kegiatan memiliki capaian kinerja di atas 85%.

Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari paparan sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yakni kegiatan Penyuluhan Sosial melalui media elektronik, media cetak dan pembuatan leaflet.

Berdasarkan pada hasil kegiatan dimaksud maka pencapaian target indikator kinerja sebesar 100%. Kegiatan penyuluhan social dilakukan untuk menyebarkan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi terhadap kelompok sasaran ke arah yang lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial

- Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat

Sasaran kegiatan ini sejumlah 55 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat

- Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat

- Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat
Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang PSM se-Sumatera Barat

4. Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan Kesejahteraan Sosial

TUJUAN 3	SASARAN 4
Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.	Terwujudnya Pemberian Bantuan, perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Pengukuran capaian sasaran strategik 4 dengan 1 indikator dapat diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
PENGUKURAN SASARAN TERWUJUDNYA TERWUJUDNYA PEMBERIAN BANTUAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2015	2016			
			Per Semester	Target	Realisasi	Capaian %
1	3	4	5			
1.	Jumlah Daerah yang terpenuhinya kebutuhan logistik	1763	Semester I	19 Kab/Kota	7	36,84
			Semester II	19 Kab/Kota	19	100.00

Sumber: Renstra (2016-2021), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

Memperhatikan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dapat diukur dengan melihat capaian indikator sasaran yaitu Jumlah Daerah yang terpenuhinya kebutuhan logistik.

a. Jumlah Daerah yang terpenuhinya kebutuhan logistik

Penanganan terhadap Korban Bencana pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 19 Kabupaten/Kota terpenuhi kebutuhan logistik dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Dibandingkan dengan tahun 2016 penanganan terhadap Korban Bencana tidak mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerja sebesar 100 % dan tahun 2017 juga mencapai 100 %. Sedangkan hasil capaian kinerja tersebut melalui pelaksanaan :

- **Program Bantuan dan Perlindungan Sosial**

dengan kegiatan Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana, Mitigasi Penanggulangan Bencana Berbasis masyarakat di daerah rawan bencana alam dan sosial, Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik, kegiatan ini merupakan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI.

Sedangkan pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui pembiayaan APBD, program adalah:

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

- *Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana;*
- *Sosialisasi Psikososial korban Bencana;*

B. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN APBD

Realisasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
REALISASI ANGGARAN APBD TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	Keuangan	Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri : - Panti Pemerintah - Panti swasta	I Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2 Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas II Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien); 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 3 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	142.813.060 95.110.460 47.702.600 4.591.718.125 552.465.000 34.865.000 543.424.950	105.217.860 71.640.260 33.577.600 4.565.432.925 551.872.000 33.738.250 542.194.000	73.68 75.32 70.39 99.43 99.89 96.77 99.77	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	

		4	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	760.566.300	758.071.200	99.67	100.00	
		5	Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	10.288.000	10.288.000	100.00	100.00	
		6	Penyediaan bahan Pendidikan;	200.025.650	200.025.650	100.00	100.00	
		7	Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	158.824.950	151.895.950	95.64	100.00	
		8	Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan;	2.252.333.775	2.252.333.775	100.00	100.00	
		9	Sehari Bersama Anak;	26.528.700	26.528.700	100.00	100.00	
		10	Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera.	12.376.900	12.086.500	97.65	100.00	
		11	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40.018.900	26.398.900	65.97	99.60	
		III	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2.606.117.070	2.604.953.950	99.95	100.00	
		1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;	493.693.210	492.906.710	99.84	100.00	

		2	Biaya Makan dan Minum Kelayan;	1.419.035.200	1.419.034.800	100.00	100.00	
		3	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	17.611.800	17.611.800	100.00	100.00	
		4	Biaya Kelengkapan Klien;	226.394.000	225.901.300	99.78	100.00	
		5	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);	83.675.300	83.625.300	99.94	100.00	
		6	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat Mental);	348.790.160	348.756.640	99.99	100.00	
		7	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	17.117.400	17.117.400	100.00	100.00	
		IV	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	4.704.184.470	4.701.336.017	99.94	100.00	
		1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	468.569.150	468.508.650	99.99	100.00	
		2	Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	263.908.828	263.174.000	99.72	100.00	
		3	Biaya Kelengkapan Klien Panti Asuhan;	196.400.000	196.365.000	99.98	100.00	
		4	Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1.632.612.452	1.632.612.452	100.00	100.00	
		5	Penyediaan bahan Obat-obatan dan	57.179.700	57.179.700	100.00	100.00	

		Dokter Pakai Habis;					
	6	Biaya Pendidikan Klien;	317.185.650	315.311.000	99.41	100.00	
	7	Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	30.800.000	30.800.000	100.00	100.00	
	8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	207.552.000	207.492.000	99.97	100.00	
	9	Biaya Makanan dan Minuman di Panti Asuhan;	940.288.000	940.286.550	99.99	100.00	
	10	Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	14.466.000	14.466.000	100.00	100.00	
	11	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	475.918.550	475.836.525	99.98	100.00	
	12	Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;	71.639.140	71.639.140	100.00	100.00	
	13	Lanjut Usia Berkreasi.	27.665.000	27.665.000	100.00	100.00	
	V	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.082.816.450	1.082.086.650	94.95	96.27	
	1	Pengadaan Kelengkapan Klien;	178.150.000	138.698.500	77.85	77.87	

		2	Biaya Obat-obatan;	25.990.000	25.949.500	99.84	100.00	
		3	Pengadaan Makanan dan Minuman;	377.468.300	369.219.500	97.81	100.00	
		4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	341.867.500	340.867.500	99.71	100.00	
		5	Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS;	64.763.450	63.763.450	98.46	98.46	
		6	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah;	58.477.500	55.682.500	95.22	100.00	
		7	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA.	36.099.700	33.905.700	93.92	100.00	
		VI	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3.554.289.895	3.534.937.877	99.99	100.00	
		1	Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat	2.805.140.645	2.797.030.645	99.71	99.71	
		2	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	57.885.750	57.885.750	100.00	100.00	

		3	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM	90.000.000	89.440.000	99.38	100.00	
		4	Bintek Pengendalian dan Pendamping Askesos	51.940.100	51.940.100	100.00	100.00	
		5	Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	102.764.000	101.171.400	98.45	100.00	
		6	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	54.932.200	54.932.200	100.00	100.00	
		7	Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan	35.297.200	35.297.200	100.00	100.00	
		8	Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	53.002.200	53.002.200	100.00	100.00	
		9	Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana	53.962.200	53.962.200	100.00	100.00	
		10	Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	53.962.200	53.961.857	99.99	100.00	
		11	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	53.962.200	53.640.000	99.40	100.00	
		12	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	60.462.200	58.562.125	96.86	100.00	
		13	Sosialisasi Bantuan Hibah dalam Negeri dalam bentuk Uang	62.062.200	62.062.200	100.00	100.00	

		14	Pelayanan Orang Terlantar	18.916.800	12.050.000	63.70	100.00	
	b. Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	VII	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	198.811.250	194.809.660	100.00	100.00	
		1	Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	122.350.250	118.848.660	97.14	100.00	
		2	Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan KAT	75.961.000	75.961.000	100.00	100.00	
	c. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil	VIII	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	165.403.900	163.650.500	100.00	100.00	
		1	Pelatihan Keterampilan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan	47.323.900	46.573.900	98.42	100.00	
		2	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan	56.600.000	56.592.600	99.99	100.00	
		3	Asistensi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Korban Pekerja Migran	60.980.000	60.484.000	99.19	100.00	

		d. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri.	IX	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	420.000.000	139.650.000	33.25	33.25	
			1	Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah	20.000.000	19.950.000	99.75	100.00	
			2	Bantuan usaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	400.000.000	119.700.000	29.93	30.00	
Terwujudnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial		a. Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	X	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	62.570.000	61.074.000	97.45	100.00	Penundaan DAU
			1	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	62.670.000	61.074.000	97.45	100.00	
Terwujudnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis		Jumlah PSKS yang terampil dan profesional	XI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.119.570.000	1.960.045.300	89.80	93.29	
			1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	50.000.000	50.000.000	100.00	100.00	
			2	Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	54.492.000	54.263.000	99.58	100.00	
			3	Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	97.496.000	94.339.600	96.76	100.00	

		4	KSN Expo dan Award dalam HKS Tahun 2016;	32.000.000	30.698.000	95.93	100.00	
		5	Penguatan Nilai-Nilai HKS;	150.000.000	149.997.800	99.99	100.00	
		6	Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota;	59.733.000	59.733.000	100.00	100.00	
		7	Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	532.202.000	481.427.200	90.46	98.60	
		8	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	420.666.000	266.881.200	63.44	66.97	
		9	Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs);	417.132.000	408.727.500	97.99	100.00	
		10	Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	58.294.000	57.999.000	99.49	100.00	
		11	Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	53.458.000	53.458.000	100.00	100.00	
		12	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	56.857.000	56.707.000	99.74	100.00	
		13	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	50.000.000	50.000.000	100.00	100.00	

Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah Daerah yang terpenuhinya kebutuhan logistik	14	Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	50.000.000	50.000.000	100.00	100.00
		15	Sidang Tim Penilaian Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD)	37.740.000	34.740.000	92.05	100.00
		XII	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	207.000.000	205.499.600	99.95	100.00
		1	Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS).	100.000.000	100.000.000	100.00	100.00
		2	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	107.000.000	105.499.600	98.60	100.00

